

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

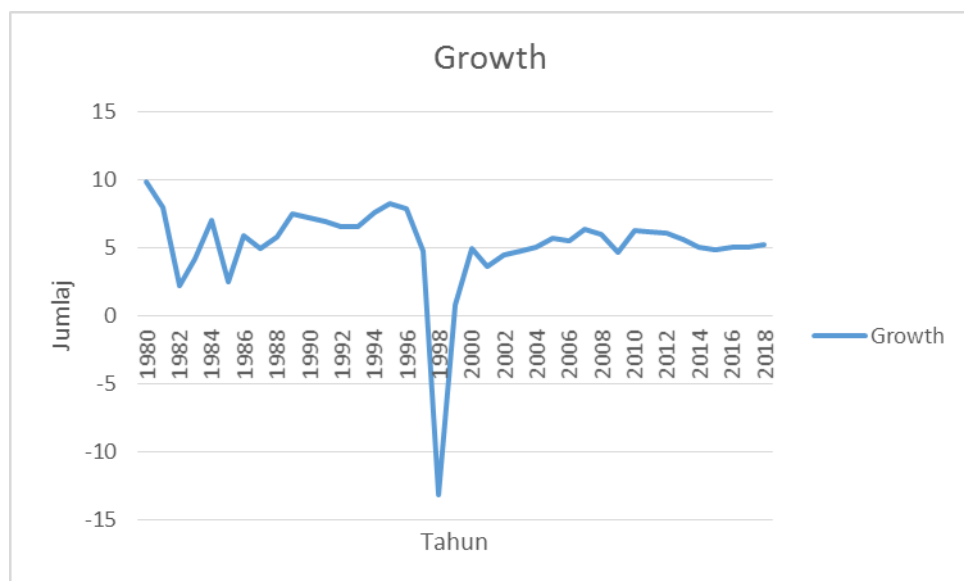
Kresnanda dan Erawati (2013) menjelaskan bahwa pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Setiap negara khususnya negara berkembang mengalami masalah yang sama, yaitu kesulitan untuk mengendalikan peningkatan pengangguran. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini, menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja kepada angkatan yang ada. Hal itu terjadi karena laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan kesempatan kerja yang ada.

Menurut Samuelson (1992) pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur.

Tingginya tingkat pengangguran merupakan persoalan yang mendasar dan hampir seluruh negara berkembang merasakannya. Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 4,68 persen. Tingkat pengangguran sebesar 4,68 persen masih merupakan pengangguran dalam skala yang wajar. Jumlah pengangguran di Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat, salah satu penyebabnya adalah peningkatan jumlah penduduk yang berarti peningkatan jumlah angkatan kerja. Ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan angkatan kerja juga semakin meningkat, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri menjadi salah satu pemicunya (Fitrawaty, 2018).

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi 1980-2018

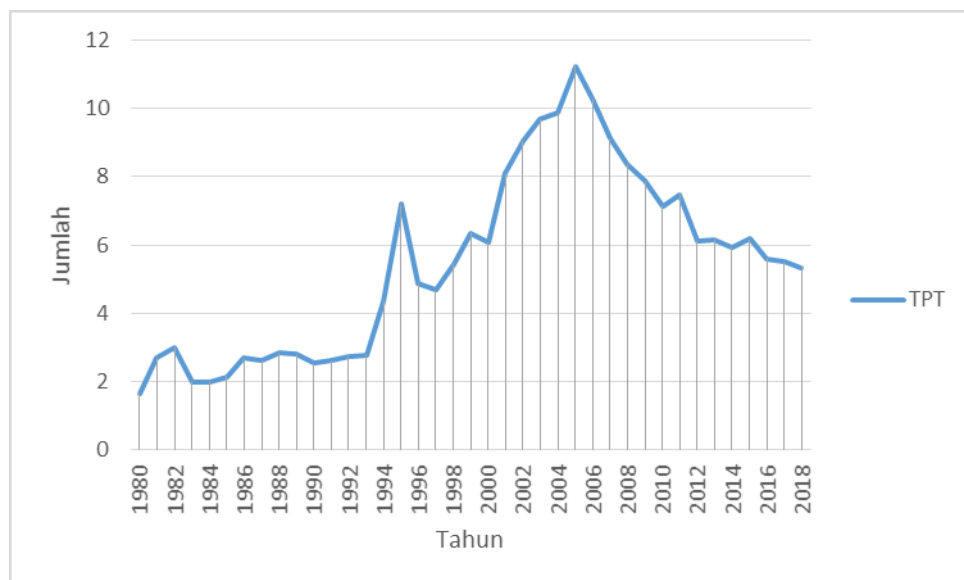


Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Apabila pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka optimalisasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus ditempuh. Maka, kebijakan fiskal juga harus didukung oleh kebijakan moneter agar target pertumbuhan ekonomi tercapai dan berkualitas dengan semakin berkurangnya angka pengangguran (Saragih, 2015).

Gambar 1.2

Data Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2018



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Pengangguran Indonesia cenderung mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 1980 sampai tahun 2018. Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 4,68 persen. Tingkat pengangguran sebesar 4,68 persen masih merupakan pengangguran dalam skala yang wajar. Dalam negara maju, tingkat penganggurannya biasanya berkisar antara 2 – 3 persen, hal ini disebut

Tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2 - 3 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) (Sukirno, 2008).

Pemerintah melalui dua kebijakannya yaitu moneter dan fiskal berperan penting dalam masalah pengangguran dan menjaga stabilitas perekonomian. Menurut Alexius dan Holmlund (2007) dalam hasil studinya menyatakan bahwa kebijakan moneter memainkan peran penting dalam fluktuasi jumlah pengangguran. Sedangkan Battaglini dan Coate (2011) juga menyatakan bahwa kebijakan fiskal memiliki fungsi penting untuk mengurangi pengangguran. Teori lain juga mengatakan bahwa pengangguran juga dipengaruhi inflasi, kebijakan moneter melalui suku bunga dan jumlah uang beredar, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dan pajak, serta pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan dari berbagai kebijakan tersebut (Asyulinda et al, 2015).

Menurut Mishkin (2010) Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral terkait dengan manajemen uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi variabel di dalam perekonomian. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah terciptanya stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (terjaganya laju inflasi), membaiknya pendapatan per kapita, serta tersedianya kesempatan kerja yang luas.

Bank Indonesia sebagai otoritas kebijakan moneter memiliki tujuan penting yaitu mencapai sasaran inflasi. Menurut Samuelson & Nordhaus (1994) menyatakan bahwa Inflasi yang berkaitan dengan kenaikan harga berhubungan langsung dengan kesejahteraan khususnya tingkat pengangguran. Hubungan

inflasi dan pengangguran tercermin pada hukum Phillips di mana terdapat *trade off* antara inflasi dan pengangguran. Dampak yang harus diperhatikan dalam kebijakan naik-turunnya tingkat suku bunga apakah semakin meningkatkan peluang usaha dan peluang kerja atau malah justru meningkatkan pengangguran dan PHK dan perlu diketahui, pengangguran dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga hanya sedikit yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja.

Kurang bersaingnya harga barang dan jasa domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Produksi menjadi dikurangi, sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi. Produksi yang berkurang akan menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong Bank sentral menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Dampak yang lebih jauh adalah pengangguran menjadi semakin tinggi (Yehosua et al., 2019).

Selaras dengan tujuan utama dari sistem ekonomi nasional yaitu mencapai kesejahteraan baik material maupun non material, maka tujuan kebijakan fiskal tentu saja dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai tujuan ekonomi nasional tersebut. Secara lebih khusus, kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tersedianya kesempatan kerja yang luas dan berkurangnya jumlah pengangguran. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 yang secara tegas menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, diantaranya melalui pengeluaran pemerintah yang diarahkan

kepada penyediaan *overhead* sosial dan ekonomi. Pengeluaran tersebut dapat dijadikan sebagai stimulus untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menaikkan efisiensi produktif perekonomian dalam jangka panjang (Prasetyia, 2012).

Menurut Deliarinov (2009) kebijakan fiskal mulai dikenal ketika John Maynard Keynes mengutarakan pendapatnya, bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang paling efektif dalam mempengaruhi jalannya perekonomian terutama dalam memberantas pengangguran dan meningkatkan output, melalui campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sedangkan dari sisi lain, kaum klasik lebih menekankan kebijakan moneter dalam mengatasi masalah perekonomian. Menurutnya, kebijakan fiskal kurang efektif dalam mengatasi masalah perekonomian karena memiliki efek *crowding out* dalam kebijakan tersebut dan hanya akan meningkatkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran swasta terutama investasi serta tidak berpengaruh pada pendapatan nasional. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua kebijakan stabilisasi makroekonomi yang saling berkaitan dalam mempengaruhi siklus ekonomi.

Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh inflasi, kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan pajak) serta kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) yang ditetapkan pemerintah dalam mengatur laju pertumbuhan ekonomi. Todaro mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) praktis dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendapatan dari pajak, pada awalnya meningkat dengan meningkatnya tarif pajak, akan tetapi pada akhirnya pajak yang semakin besar mengurangi pendapatan pemerintah karena pajak mengurangi ukuran pasar (Mankiw, 2003).

Setiap negara memiliki caranya masing-masing dalam mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sebagai cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulis adalah untuk mengetahui konsistensi pengaruh masing-masing variabel ekonomi moneter dan kebijakan fiskal terhadap pengangguran. Konsistensi ini bisa dilihat dari masing-masing pengaruh negatif atau positif variabel pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, jumlah uang beredar, suku bunga dan inflasi terhadap pengangguran serta dominasi masing-masing variabel ekonomi tersebut. Dengan tujuan tersebut maka peneliti mengangkat judul “ Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Terhadap Pengangguran Di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana keterkaitan antara kebijakan moneter terhadap pengangguran di Indonesia?
2. Bagaimana keterkaitan antara kebijakan fiskal terhadap pengangguran di Indonesia?
3. Diantara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kebijakan mana yang lebih dominan mempengaruhi pengangguran di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara kebijakan moneter terhadap pengangguran di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara kebijakan fiskal terhadap pengangguran di Indonesia
3. Untuk mengetahui diantara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kebijakan mana yang lebih dominan mempengaruhi pengangguran di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan dalam mengurangi pengangguran.
2. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan perubahan pada tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, dan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan inflasi mempengaruhi pengangguran.
3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, dan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan inflasi mempengaruhi pengangguran.